

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2014-2023

Alvaro Deleon Sidauruk¹ Dwi Belcha Ananda² Eko Wahyu Nugrahadi³ Elsa Novri Regina⁴
Intan Febyanti⁵ Syaila Azzahraini Siregar⁶

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: dwieocha5@gmail.com² ewahyunugrahadi@gmail.com³ elsargn29@gmail.com⁴
intanfebyanti3@gmail.com⁵ syailazahra115@gmail.com⁶

Abstract

This research aims to analyze the influence of income inequality and the human development index on poverty in North Sumatra Province. Using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) as well as multiple linear regression analysis methods, this research aims at the relationship between the independent variable, namely income inequality as measured through the Gini Index and human development index (HDI), with the dependent variable, namely the poverty level. The research results show that income inequality has a positive and significant influence on poverty levels, which means that increasing income inequality tends to increase poverty rates. On the other hand, the human development index has a negative and significant effect on poverty, which shows that increasing HDI tends to reduce poverty levels. These findings indicate the need for policies that focus more on income distribution and improving the quality of human development to reduce poverty in North Sumatra.

Keywords: Income Inequality, Human Development Index, Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta metode analisis regresi linier berganda, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara variabel independen, yaitu ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini dan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam IPM cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik negara maupun daerah. Tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara atau daerah dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dari negara atau daerah itu sendiri. Dalam suatu wilayah, apabila penduduk miskin semakin banyak, maka wilayah tersebut semakin tidak sejahtera dan sebaliknya apabila terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap penduduk, itu disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin menjadi lebih sedikit (Leasiwal, 2013). Masalah kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, pertumbuhan ekonomi yang mengalami keterlambatan, terdapatnya ketimpangan pendapatan

dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir keseluruhan negara-negara berkembang tanpa terkecuali di Indonesia. Bahkan perdebatan tentang kemiskinan dan penanggulangannya hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar untuk diselesaikan (Ayu et al., 2010). Kompleksitas dalam tinjauan permasalahan kemiskinan tersebut, tidak terlepas atas banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup kompleks dan hal ini tidak terlepas atas banyaknya variabel yang menentukan kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kemiskinan yang timbul disebabkan adanya faktor tunggal (Ginting & Rasbin, 2010). Uraian senada dikemukakan pula oleh Asrol & Ahmad (2018) bahwa kompleksitas dan multidimensi atas kemiskinan disebabkan atas beragamnya definisi tentang kemiskinan. Dimana kemiskinan tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi, tetapi juga telah secara meluas terkait dengan berbagai dimensi, seperti sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Ayu et al (2010) menambahkan bahwa definisi kemiskinan yang bersifat multidimensi dan sulit diukur, mengakibatkan sering kali kebijakan yang diturunkan dalam mengetaskan kemiskinan menjadi inkonsistensi. Terjadi peningkatan dan penurunan kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2014 – 2023. Kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu 10,53 persen hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, dan juga imbas dari perlambatan ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor riil. Begitu juga dengan harga beras pada periode tersebut yang mengalami peningkatan 14,48 persen. Pada tahun 2023 kemiskinan terjadi penurunan yang sangat pesat yaitu 8,15 persen hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi serta faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah meningkatkan pendapatan per kapita yang tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%, dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93% dan peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut. Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan dapat menyebabkan pendapatan per kapita yang rendah, sehingga banyak orang tetap berada dalam kemiskinan.
2. Pengangguran: Tingginya tingkat pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga, meningkatkan risiko kemiskinan.
3. Distribusi Pendapatan: Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin.
4. Inflasi: Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan distribusi pendapatan erat hubungannya dengan kemiskinan, karena kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah semakin timpang. Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan sering dialami oleh beberapa negara berkembang. Setiap negara tentunya mempunyai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang kemudian diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat dimana nantinya dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan terjadi pemerataan. Menurut Sugiyarto (2015:116), hubungan ketimpangan dan kemiskinan adalah hubungan pragmatis, yakni kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan atau kemiskinan terbentuk dari ketimpangan. Ketimpangan di suatu daerah akan memunculkan suatu masalah seperti peningkatan migrasi, tindakan kriminal dan konflik antar penduduk (Fahrizal, 2019:400)

Terjadi peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara pada tahun 2014 – 2023. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio ketimpangan pendapatan yaitu sebesar 0,3120 persen sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio ketimpangan pendapatan yaitu sebesar 0,3090 persen. Terjadi peningkatan rasio ketimpangan pendapatan pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan BBM sehingga memperlebar kesenjangan pengeluaran konsumsi antar rumah tangga. Hasil temuan ini sejalan pula dengan temuan beberapa peneliti terdahulu Badriah(2019); Suparman et al (2021) bahwa ketimpangan pendapatan (distribusi pendapatan) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nisa et al (2020), penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diterima dan sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor diantaranya yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. (Ibnurrasyad, 2014). IPM adalah faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai daerah. IPM mencakup beberapa indikator penting seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup, yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Penurunan angka kemiskinan ketika IPM meningkat merupakan indikasi bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja penduduk yang akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat mengurangi kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia secara umum diukur dengan indek pembangunan manusia (IPM). Besar kecilnya produktivitas penduduk digambarkan oleh tinggi rendahnya IPM. Semakin tinggi IPM akan mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan akan mempengaruhi peningkatan terhadap tingkat pendapatan penduduk. Sebaliknya, jika IPM rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya IPM dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang menentukan produktivitas dan mendorong tingkat pendapatan.

Terjadi peningkatan secara terus menerus selama tahun 2014 – 2023. Peningkatan IPM Sumatera Utara 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Terjadi peningkatan IPM secara terus menerus ini disebabkan oleh dukungan Pemprov Sumut kepada para pelajar untuk lebih rajin membaca melalui pojok baca dan pengembangan perpustakaan yang tersedia di 33 kabupaten/kota bahkan sampai ke desa. Temuan ini sejalan dengan temuan dari beberapa peneliti terdahulu yakni Fiskal & Wardani(2020); Lilik Andrietya et al(2020); Desmawan et al(2021); Rifkah & Nabila(2021); Ayu et al (2021) bahwa IPM berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan. Dimana tingginya kualitas sumber daya manusia yang tercermin atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berimplikasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Nilai IPM dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan standar hidup yang layak Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar

di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait ketimpangan pendapatan dan upaya peningkatan IPM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara masih relatif tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien Gini yang cukup besar. Sementara itu, meskipun IPM Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di daerah ini tetap menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan dan IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan memahami hubungan antara ketiga variabel ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti BPS dan laporan-laporan pemerintah, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk pemerintah daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara.

Kajian Teori

Ketimpangan Pendapatan

Menurut Smith dan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Karl Marx berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan adalah hasil dari sistem kapitalis yang mengeksploitasi pekerja demi keuntungan pemilik modal. Menurut Marx, hanya dengan mengganti kapitalisme dengan sosialisme, ketimpangan ini dapat diatasi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Glaeser, 2006) Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah - daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing - masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar (Retnosari, 2006). Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12% - 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

Kuncoro (2006) ketimpangan pendapatan ialah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Sukirno (2006) Ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Baldwin (1986) Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran

ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain: Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar (Latifah, 2017). IPM menunjukkan bahwa tingkat dan distribusi sekolah untuk seluruh penduduk menentukan distribusi pendapatan (Backer & Chiswick 1966; Mincer 1974). Menurut (Putra, 2018) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia diukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia, biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat, yaitu: IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintahan, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kemiskinan

Pendekatan absolut mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar tetap, seperti garis kemiskinan internasional. Pendekatan relatif melihat kemiskinan dalam konteks distribusi pendapatan di dalam suatu masyarakat, di mana individu dianggap miskin jika mereka tidak dapat mencapai standar hidup yang wajar dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Teori Siklus Kemiskinan: Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat turun-temurun. Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin cenderung memiliki akses yang terbatas ke pendidikan dan peluang ekonomi, yang kemudian menjebak mereka dalam kemiskinan.

Pendekatan Multidimensi: Teori ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga kekurangan dalam aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Pendekatan ini tercermin dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Kemiskinan menurut Suparlan (1995), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Addae-Korankye (2019) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sumber daya seseorang atau sekelompok orang khususnya sumber daya material yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Davis & Sanchez-martinez (2014) kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangannya yang nyata dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi.

JRF (2013) dalam (Davis & Sanchez-martinez, 2014), mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi dimana sumberdaya seseorang terutama sumber daya materialnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum (termasuk partisipasi sosial). Sedangkan dalam definisi berbeda dikemukakan pula oleh Bank dunia bahwa kemiskinan lebih ditetankan pada kondisi yang lebih spesifik seperti malnutrisi, buta huruf dan penyakit. Asrol & Ahmad (2018) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi tetapi juga merambah ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu atau tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dapat dikategorikan miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Basis kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan minimum bukan makanan, yang terdiri dari kebutuhan akan tempat tinggal, sandang, sekolah, dan transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu lainnya. Menurut BPS (2022), secara konseptual definisi kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi: (a) kemiskinan absolut dan (b) kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relative merupakan kondisi miskin yang disebabkan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data berbentuk numerik atau angka. Riset ini dilakukan di Sumatera Utara dalam kurun waktu sepuluh tahun (2014-2023) untuk mengetahui Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan IPM terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data time series dan data cross section. Data yang digunakan adalah data Sumatera Utara dari tahun 2014-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui hasil penelitian yang dipublikasikan oleh instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan IPM. Variabel penelitian yang digunakan ada dua yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pendapatan dan IPM.

2. Variabel terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan di Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari dan mengumpulkan data-data yang terdapat di website resmi dan data hasil publikasi yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan estimasi model regresi dengan menggunakan regresi linear berganda Analisis regres digunakan untuk menggambarkan model hubungan antara variabel, selain itu digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang secara statistik berpengaruh terhadap variabel terikat untuk memudahkan dalam analisis maka penelitian ini menggunakan bantuan software E-Views 12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang diberikan, kita dapat membuat sebuah pembahasan yang merangkum temuan dan implikasinya terhadap pengaruh ketimpangan pendapatan (K) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan (KP). Berikut adalah pembahasan berdasarkan temuan yang disajikan:

1. Stasioneritas Data: Hasil uji unit root menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan (K), kemiskinan (KP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki unit root pada rentang waktu 2014-2023. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut bersifat stasioner dan tidak mengalami tren yang signifikan selama periode tersebut.
2. Regresi Jangka Panjang: Dalam regresi jangka panjang, variabel kemiskinan (KP) memiliki koefisien sebesar 0.005753 dengan probabilitas sebesar 0.0691, sedangkan variabel IPM memiliki koefisien sebesar $3.40E-07$ dengan probabilitas sebesar 0.6697. Ini menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan (K) memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap variabel kemiskinan dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Error Correction Term (ECT): Hasil uji ECT menunjukkan bahwa variabel ECT tidak memiliki unit root pada rentang waktu yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model regresi cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah terjadi gangguan.
4. Regresi Jangka Pendek (ECM): Dalam regresi jangka pendek, variabel perubahan ketimpangan pendapatan ($D(K)$) memiliki koefisien sebesar 0.009254 dengan probabilitas sebesar 0.0421, sementara variabel perubahan IPM ($D(IPM)$) memiliki koefisien sebesar $-6.45E-08$ dengan probabilitas sebesar 0.8642. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam tingkat kemiskinan, sementara perubahan dalam IPM tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek.
5. Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi: Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi homoskedastisitas pada model regresi. Demikian pula, uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi ketidaktergantungan pada model regresi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, terutama dalam jangka panjang. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan harus lebih fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang.

1. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan. Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|0,180091| > t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 ditolak atau H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,08642. Artinya, variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar (6,4508) artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar (6,4508) persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra,dkk (2010) yang menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2014-2023. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2006).
2. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan. Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|0,180091| > t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 ditolak atau H_3 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,08642. Artinya, variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,08642 artinya bahwa setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0498 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cholili (2014). Hal ini selaras dengan pernyataan Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

KESIMPULAN

Dapat diambil beberapa kesimpulan penting: Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, terutama dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan. Meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek, peningkatan IPM dapat berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dengan setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0498 persen. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan, IPM, dan tingkat kemiskinan, yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih terarah dalam upaya mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara dan wilayah lainnya.

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia, berikut adalah beberapa saran kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Penguatan Program Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan untuk meningkatkan IPM dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Kebijakan Redistribusi Pendapatan: Implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial yang terfokus pada kelompok masyarakat yang rentan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi: Investasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti jaringan transportasi dan energi, dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Kerjasama antara Pemerintah: Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan. Koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan dapat memaksimalkan efektivitas kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diimplementasikan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan evaluasi yang baik, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Dengan mengimplementasikan saran-saran kebijakan di atas secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pembangunan manusia di wilayah Sumatera Utara dan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <http://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <http://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Fadlillah, Nurul, Agustin Susyatna Dewi, and Sukiman Sukiman. "Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk

- terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013." *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 11.1 (2016).
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kemiskinan Ipm Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 148–160. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/3380/3/BAB1.pdf>
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kemiskinan Ipm Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 148–160. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/3380/3/BAB1.pdf>
- Firdaus, A., & Indira Hasmarini, M. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 116–123. <http://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2128>
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota – Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61–72.
- Leonita, Lily, and Rini Kurnia Sari. "Pengaruh PDRB, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3.2 (2019): 1-8
- Maskur, S. R. R. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Nurjannah, Sari, L., & Yovita, I. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2021. *Jurnal Ekonmi Dan Bisnis*, 11(1), 567–574.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <http://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66. <http://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Sunaryon N.Tuah. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Regional Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(2), 182–193. Retrieved from <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Supit, Q. V. F., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 23(10), 73–84.
- Terhadap, I. P. M., Kemiskinan, T., & Yogyakarta, D. I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat kemiskinan di yogyakarta, 00, 1–10.
- Wira Hendri, & Taufan Iswandi. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(1), 43–50. <http://doi.org/10.53952/jir.v10i1.388>